



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 06), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Huruf c diubah, dan huruf j dihapus, serta penambahan huruf n dan huruf o, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, serta tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- b. Meningkatkan fungsi penyelenggaran Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat desa melalui pengalokasian biaya operasional pemerintah desa;
- c. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengalokasian biaya operasional;
- d. Meningkatkan fungsi dan peran TP-PKK desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pengalokasian biaya operasional;

- e. Meningkatkan fungsi dan peran LPM dalam perencanaan partisipatif sesuai dengan potensi desa melalui pengalokasian biaya operasional;
- f. Meningkatkan fungsi dan peran RT dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengalokasian insentif;
- g. Meningkatkan fungsi dan peran Karang Taruna dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pengalokasian biaya operasional;
- h. Meningkatkan fungsi dan peran imam desa dan pemangku adat melalui pengalokasian insentif;
- i. Meningkatkan fungsi dan peran kader posyandu melalui pengalokasian Insentif;
- j. Dihapus;
- k. Meningkatkan fungsi dan peran kader Pertahanan Sipil (Hansip) melalui pengalokasian Insentif;
- l. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa dalam rangka tercipta pelayanan prima terhadap masyarakat desa;
- m. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan kelembagaan desa;
- n. Peningkatan kualitas Iman dan Taqwa melalui pengadaan sarana perlengkapan Peribadatan;
- o. Meningkatkan fungsi dan peran Guru mengaji bagi Agama Islam atau sebutan lain bagi agama Kristen, Hindu, dan Budha melalui pengalokasian insentif.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- 2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- 1) Perubahan besaran rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2) Perubahan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 3) Perubahan besaran biaya operasional Pemerintah Desa, BPD, TP-PKK, LPM, Karang Taruna dan insentif Rukun Tetangga (RT), Imam Desa, Pemangku Adat, Kader Posyandu, Pertahan Sipil (Hansip) serta insentif Guru Agama (Islam, Kristen, Hindu, dan Budha) ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3), merupakan nilai maksimal sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini yang penggunaannya dialokasikan berdasarkan kebutuhan skala prioritas.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b diubah dan penambahan huruf k, ayat (3) penambahan huruf q, dan ayat (4) huruf e diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
- 2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui kegiatan :
 - a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa;
 - c) *Biaya operasional Pemerintahan Desa, meliputi :*
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - . Alat tulis kantor;
 - . Makan dan minum rapat;
 - . Snak rapat;
 - . Makan dan minum tamu desa;
 - . Perjalanan dinas;
 - . Pengadaan dan cetak laporan;
 - . Koran masuk desa;
 - . Pakaian dinas/adat perangkat dan kelembagaan desa;
 - . Pembayaran rekening listrik kantor desa;
 - . Operasional/pemeliharaan kendaraan dinas pemerintah desa.
 - . Dst.

3. Belanja modal :
 - . Komputer/Laptop dan printer;
 - . Lemari arsip;
 - . Meja dan kursi;
 - . Mesin tik;
 - . Pemasangan instalasi listrik.
 - . Dst.
- d) Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - . Alat tulis kantor;
 - . Makan dan minum rapat;
 - . Snak rapat;
 - . Perjalanan dinas;
 - . Pengadaan dan cetak laporan;
 - . Dst.
 - e) Operasional RT melalui insentif;
 - f) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - g) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya ;
 - h) Pengelolaan profil desa atau data base desa lainnya;
 - i) Pembiayaan sertifikat tanah milik pemerintah desa;
 - j) Pemeliharaan inventaris desa;
 - k) Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
 - l) Dst.
- 3) Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui kegiatan :
 - a) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan balai desa;
 - b) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - c) Pembangunan rumah tidak layak huni masyarakat miskin;
 - d) Pembangunan kawasan perdesaan lainnya;
 - e) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya;
 - f) Pembiayaan desa mandara mendidoha;
 - g) Pengadaan perlengkapan sarana Peribadatan.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui kegiatan :
 - a. Bantuan operasional Tim Penggerak PKK meliputi :
 1. Belanja pegawai ;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - . Alat tulis kantor;
 - . Makan dan minum rapat;
 - . Snak rapat;
 - . Perjalanan dinas;
 - . Pengadaan dan cetak laporan;
 - . Pakaian seragam PKK;
 - . Pelatihan kader PKK desa.
 3. Belanja modal :
 - . Pembuatan papan data PKK;
 - . Pengadaan buku PKK;
 - . Dst.

- b. Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meliputi :
 - 1. Belanja pegawai;
 - 2. Belanja barang dan jasa :
 - . Alat tulis kantor;
 - . Makan dan minum rapat;
 - . Snak rapat;
 - . Perjalanan dinas;
 - . Pengadaan dan cetak laporan;
 - . Pakaian seragam.
 - c. Bantuan Operasional Karang Taruna meliputi :
 - 1. Belanja pegawai;
 - 2. Belanja barang dan jasa :
 - . Alat tulis kantor;
 - . Makan dan minum rapat;
 - . Snak rapat;
 - . Pengadaan dan cetak laporan.
 - 3. Belanja modal :
 - . Atribut karang taruna;
 - . Alat olahraga;
 - . Seragam/kostum olahraga;
 - d. Insentif Imam Desa dan Pemangku Adat;
 - e. Bantuan operasional kelembagaan masyarakat lainnya melalui pengalokasian :
 - . Insentif tenaga kader posyandu;
 - . dihapus;
 - . Insentif Hansip;
 - . Insentif Guru Agama (Islam, Kristen, Hindu, dan Budha).
 - f. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa;
 - g. Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan keluarganya maksimal 5 (lima) orang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - h. Pembiayaan desa mandara mendidoha.
- 5) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui kegiatan :
- a) Pembiayaan perlombaan desa ;
 - b) Pembiayaan HUT RI;
 - c) Pembiayaan HUT Kabupaten;
 - d) Penyuluhan kesehatan;
 - e) Penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan minuman keras;
 - f) Pengembangan sosial dan keagamaan;
 - g) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - h) Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Huruf a dan huruf b diubah, serta huruf c dihapus, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- 1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap;
- 2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus);


- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. Dihapus.
- 3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahun anggaran sebelumnya yang diketahui Camat;
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang imam desa dan pemangku adat;
 - f. Surat Keputusan Bupati tentang BPD;
 - g. Surat Keputusan Ketua TP-PKK kab./Kecamatan tentang TP-PKK desa;
 - h. Surat Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
 - i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
 - j. Surat Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD;
 - k. Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK;
 - l. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap I tahun anggaran berjalan;
 - m. Gambar/desain dan RAB kegiatan fisik;
 - n. Dokumen sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD).
- 4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahap I tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari camat;
 - c. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap II tahun anggaran berjalan;
 - d. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa (*Jika Ada*);
 - e. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan Rencana penggunaan dana (RPD) tahap II diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD).
- 5) Dihapus;
- 6) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 02 Mei 2016


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA

Sekda
Asisten I
Ka. BPMD

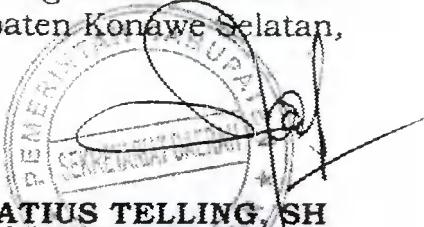
Ka. BID. Pendes
Kombid. OTaunni

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 02 Mei 2016

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**


Hj. SITTI RACHMI ANDI DJUFRI

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum SETDA
Kabupaten Konawe Selatan,


H. MATIUS TELLING, SH
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c.
NIP. 19590523-198103 1 011

Lampiran I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 02 Mei 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR
06 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.PERUBAHAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	
1	TINANGGEA		4,788,077,000	2,872,846,200	1,915,230,800	
1	LAPOA	74.05. 012. 003	215,599,000	129,359,400	86,239,600	
2	ASINGI	74.05. 012. 006	231,324,000	138,794,400	92,529,600	
3	WATU MELEWE	74.05. 012. 007	209,453,000	125,671,800	83,781,200	
4	WADONGGO	74.05. 012. 009	234,499,000	140,699,400	93,799,600	
5	BUNGIN PERMAI	74.05. 012. 010	230,875,000	138,525,000	92,350,000	
6	PALOTAWO	74.05. 012. 014	217,487,000	130,492,200	86,994,800	
7	LALONGGASU	74.05. 012. 019	210,493,000	126,295,800	84,197,200	
8	MOLO INDAH	74.05. 012. 020	213,585,000	128,151,000	85,434,000	
9	TELUTU JAYA	74.05. 012. 021	231,709,000	139,025,400	92,683,600	
10	TOROKEKU	74.05. 012. 023	220,398,000	132,238,800	88,159,200	
11	LAPULU	74.05. 012. 024	219,247,000	131,548,200	87,698,800	
12	RORAYA	74.05. 012. 027	238,371,000	143,022,600	95,348,400	
13	LANOWULU	74.05. 012. 029	219,572,000	131,743,200	87,828,800	
14	LALO WATU	74.05. 012. 030	207,467,000	124,480,200	82,986,800	
15	TATANGGE	74.05. 012. 032	209,896,000	125,937,600	83,958,400	
16	WUNDUMBOLO	74.05. 012. 033	208,203,000	124,921,800	83,281,200	
17	PANGGOOSI	74.05. 012. 034	209,024,000	125,414,400	83,609,600	
18	BOMBA-BOMBA	74.05. 012. 035	211,656,000	126,993,600	84,662,400	
19	AKUNI	74.05. 012. 036	217,298,000	130,378,800	86,919,200	
20	LASUAI	74.05. 012. 037	207,037,000	124,222,200	82,814,800	
21	MATAMBAWI	74.05. 012. 038	216,789,000	130,073,400	86,715,600	
22	MATANDAH	74.05. 012. 039	208,095,000	124,857,000	83,238,000	
2	ANGATA		5,375,830,000	3,225,498,000	2,150,332,000	
1	PEWUTAA	74.05. 022. 001	228,805,000	137,283,000	91,522,000	
2	AOPA	74.05. 022. 002	221,871,000	133,122,600	88,748,400	
3	MOTAHA	74.05. 022. 003	208,926,000	125,355,600	83,570,400	
4	LAMOEN	74.05. 022. 004	233,132,000	139,879,200	93,252,800	
5	PUUSANGGULA	74.05. 022. 005	215,734,000	129,440,400	86,293,600	
6	PUAO	74.05. 022. 006	234,715,000	140,829,000	93,886,000	
7	SANDEY	74.05. 022. 007	220,460,000	132,276,000	88,184,000	
8	TETEASA	74.05. 022. 008	258,001,000	154,800,600	103,200,400	
9	SIMBANGU	74.05. 022. 009	230,044,000	138,026,400	92,017,600	
10	LAMOOSO	74.05. 022. 010	221,901,000	133,140,600	88,760,400	
11	LANDABARO	74.05. 022. 011	225,851,000	135,510,600	90,340,400	
12	PUUNGONI	74.05. 022. 012	211,357,000	126,814,200	84,542,800	
13	SANDARSI JAYA	74.05. 022. 013	218,667,000	131,200,200	87,466,800	
14	PUUROE	74.05. 022. 014	215,786,000	129,471,600	86,314,400	
15	LAMOERI	74.05. 022. 015	245,141,000	147,084,600	98,056,400	
16	KOSEBO	74.05. 022. 016	223,723,000	134,233,800	89,489,200	
17	MATAIWOI	74.05. 022. 017	216,369,000	129,821,400	86,547,600	
18	ANGATA	74.05. 022. 018	218,997,000	131,398,200	87,598,800	
19	PUDAMBU	74.05. 022. 019	229,543,000	137,725,800	91,817,200	
20	MATABONDU	74.05. 022. 020	229,579,000	137,747,400	91,831,600	
21	MOKOAU	74.05. 022. 040	211,977,000	127,186,200	84,790,800	
22	BOLOSO	74.05. 022. 041	218,327,000	130,996,200	87,330,800	
23	PUULIPU	74.05. 022. 042	223,454,000	134,072,400	89,381,600	
24	LANGGEA INDAH	74.05. 022. 043	213,470,000	128,082,000	85,388,000	
3	ANDOULO		1,750,054,000	1,050,032,400	700,021,600	
1	ANDOULO	74.05. 032. 001	228,911,000	137,346,600	91,564,400	
2	ALENGGE AGUNG	74.05. 032. 004	212,155,000	127,299,000	84,866,000	
3	BUMI RAYA	74.05. 032. 010	224,435,000	134,661,000	89,774,000	
4	LALOBEO	74.05. 032. 014	215,936,000	129,561,600	86,374,400	
5	LALONGGOMBU	74.05. 032. 015	224,630,000	134,778,000	89,852,000	
6	WUNDUWATU	74.05. 032. 026	223,859,000	134,315,400	89,543,600	
7	PUNGGAPU	74.05. 032. 031	211,724,000	127,034,400	84,689,600	
8	ATAKU	74.05. 032. 033	208,394,000	125,036,400	83,357,600	

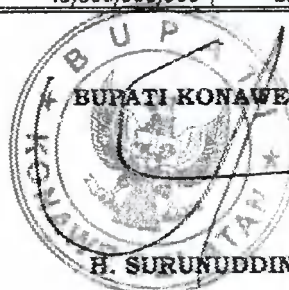
NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	
4	PALANGGA		3,079,960,000	1,847,976,000	1,231,984,000	
1	AOSOLE	74.05. 042. 003	240,139,000	144,083,400	96,055,600	
2	ANGGONDARA	74.05. 042. 005	215,384,000	129,230,400	86,153,600	
3	Eewa	74.05. 042. 007	220,081,000	132,048,600	88,032,400	
4	KIAEA	74.05. 042. 008	228,505,000	137,103,000	91,402,000	
5	MEKAR SARI	74.05. 042. 011	222,625,000	133,575,000	89,050,000	
6	ONEMBUTE	74.05. 042. 013	229,236,000	137,541,600	91,694,400	
7	WAWORAHA	74.05. 042. 018	212,651,000	127,590,600	85,060,400	
8	WATUMEREMBE	74.05. 042. 019	215,210,000	129,126,000	86,084,000	
9	WAWOURU	74.05. 042. 022	216,410,000	129,846,000	86,564,000	
10	ALAKAYA	74.05. 042. 025	215,072,000	129,043,200	86,028,800	
11	WAWONGGURA	74.05. 042. 029	208,705,000	125,223,000	83,482,000	
12	KAPU JAYA	74.05. 042. 030	212,511,000	127,506,600	85,004,400	
13	WATUDEMBA	74.05. 042. 031	230,343,000	138,205,800	92,137,200	
14	SANGGI-SANGGI	74.05. 042. 032	213,088,000	127,852,800	85,235,200	
5	LANDONO		2,326,119,000	1,395,671,400	930,447,600	
1	LALONGGAPU	74.05. 052. 008	206,893,000	124,135,800	82,757,200	
2	WATA BENUA	74.05. 052. 009	209,664,000	125,798,400	83,865,600	
3	TRIDANA MULYA	74.05. 052. 014	205,729,000	123,437,400	82,291,600	
4	LANDONO 2	74.05. 052. 015	207,909,000	124,745,400	83,163,600	
5	AMOTOWO	74.05. 052. 016	232,552,000	139,531,200	93,020,800	
6	ABENGGI	74.05. 052. 022	209,068,000	125,440,800	83,627,200	
7	ARONGO	74.05. 052. 023	210,319,000	126,191,400	84,127,600	
8	ENDANGA	74.05. 052. 024	208,581,000	125,148,600	83,432,400	
9	WONUUA SANGIA	74.05. 052. 032	215,437,000	129,262,200	86,174,800	
10	LAKOMEA	74.05. 052. 035	211,643,000	126,985,800	84,657,200	
11	MORINI MULYA	74.05. 052. 042	208,324,000	124,994,400	83,329,600	
6	LAINEA		2,597,285,000	1,558,371,000	1,038,914,000	
1	LALONGGOMBU	74.05. 062. 011	225,760,000	135,456,000	90,304,000	
2	WATUMEETO	74.05. 062. 013	212,753,000	127,651,800	85,101,200	
3	PAMANDATI	74.05. 062. 014	225,217,000	135,130,200	90,086,800	
4	PANGAN JAYA	74.05. 062. 015	211,282,000	126,769,200	84,512,800	
5	AOREO	74.05. 062. 020	208,253,000	124,951,800	83,301,200	
6	KAINDI	74.05. 062. 021	210,757,000	126,454,200	84,302,800	
7	MATABUBU JAYA	74.05. 062. 022	223,723,000	134,233,800	89,489,200	
8	LAINEA	74.05. 062. 024	217,552,000	130,531,200	87,020,800	
9	MOLINESE	74.05. 062. 025	213,963,000	128,377,800	85,585,200	
10	POLEWALI	74.05. 062. 026	214,943,000	128,965,800	85,977,200	
11	BANGUN JAYA	74.05. 062. 027	220,114,000	132,068,400	88,045,600	
12	KALO-KALO	74.05. 062. 028	212,968,000	127,780,800	85,187,200	
7	KONDA		3,501,307,000	2,100,784,200	1,400,522,800	
1	PUOSU JAYA	74.05. 072. 002	215,495,000	129,297,000	86,198,000	
2	LAMOMEA	74.05. 072. 003	232,525,000	139,515,000	93,010,000	
3	ALEBO	74.05. 072. 004	218,039,000	130,823,400	87,215,600	
4	MOROME	74.05. 072. 005	221,232,000	132,739,200	88,492,800	
5	LEBO JAYA	74.05. 072. 006	220,914,000	132,548,400	88,365,600	
6	LAMBUSA	74.05. 072. 007	227,290,000	136,374,000	90,916,000	
7	POMBULAA JAYA	74.05. 072. 008	213,098,000	127,858,800	85,239,200	
8	AMBOLOLI	74.05. 072. 009	220,570,000	132,342,000	88,228,000	
9	TANEA	74.05. 072. 010	226,390,000	135,834,000	90,556,000	
10	MASAGENA	74.05. 072. 011	216,670,000	130,002,000	86,668,000	
11	CIALAM JAYA	74.05. 072. 012	229,289,000	137,573,400	91,715,600	
12	WONUUA	74.05. 072. 013	213,268,000	127,960,800	85,307,200	
13	LAWOILA	74.05. 072. 014	215,844,000	129,506,400	86,337,600	
14	LALOWIU	74.05. 072. 019	213,708,000	128,224,800	85,483,200	
15	AMOHALO	74.05. 072. 020	208,190,000	124,914,000	83,276,000	
16	KONDA SATU	74.05. 072. 024	208,785,000	125,271,000	83,514,000	
8	RANOMEETO		2,378,226,000	1,426,935,600	951,290,400	
1	ONEWILA	74.05. 082. 002	218,770,000	131,262,000	87,508,000	
2	BORO-BORO R	74.05. 082. 004	223,052,000	133,831,200	89,220,800	
3	RAMBU-RAMBU JAYA	74.05. 082. 005	214,228,000	128,536,800	85,691,200	
4	AMOITO	74.05. 082. 008	211,031,000	126,618,600	84,412,400	
5	AMBAIPUA	74.05. 082. 014	219,003,000	131,401,800	87,601,200	
6	RANOHA	74.05. 082. 015	212,054,000	127,232,400	84,821,600	
7	LANGGEA	74.05. 082. 016	217,089,000	130,253,400	86,835,600	
8	KOTA BANGUN	74.05. 082. 017	220,518,000	132,310,800	88,207,200	
9	LAIKAHA	74.05. 082. 019	214,083,000	128,449,800	85,633,200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	
10	DUDURIA	74.05. 082. 020	210,258,000	126,154,800	84,103,200	
11	AMOITO SIAMA	74.05. 082. 021	218,140,000	130,884,000	87,256,000	
9	KOLONO		4,290,139,000	2,574,083,400	1,716,055,600	
1	SAWA	74.05. 092. 002	213,049,000	127,829,400	85,219,600	
2	LANGGOWALA	74.05. 092. 003	212,842,000	127,705,200	85,136,800	
3	WAWORANO	74.05. 092. 004	214,371,000	128,622,600	85,748,400	
4	MATANDAH	74.05. 092. 005	207,271,000	124,362,600	82,908,400	
5	PUUPI	74.05. 092. 006	215,769,000	129,461,400	86,307,600	
6	MATAIWOI	74.05. 092. 007	214,574,000	128,744,400	85,829,600	
7	TIRAOSU	74.05. 092. 008	211,698,000	127,018,800	84,679,200	
8	MONDOE JAYA	74.05. 092. 009	218,016,000	130,809,600	87,206,400	
9	ULUSENA JAYA	74.05. 092. 010	211,474,000	126,884,400	84,589,600	
10	LAMOTAU	74.05. 092. 011	216,813,000	130,087,800	86,725,200	
11	AWUNIO	74.05. 092. 012	215,880,000	129,528,000	86,352,000	
12	MELETUMBO	74.05. 092. 013	221,508,000	132,904,800	88,603,200	
13	RODA	74.05. 092. 014	222,117,000	133,270,200	88,846,800	
14	LAMAPU	74.05. 092. 016	218,384,000	131,030,400	87,353,600	
15	ANDINETE	74.05. 092. 025	214,914,000	128,948,400	85,965,600	
16	WAWOOSU	74.05. 092. 026	212,651,000	127,590,600	85,060,400	
17	ALOSI	74.05. 092. 028	210,485,000	126,291,000	84,194,000	
18	SILEA	74.05. 092. 029	217,858,000	130,714,800	87,143,200	
19	PUUDONGI	74.05. 092. 030	209,353,000	125,611,800	83,741,200	
20	SARANDUA	74.05. 092. 031	211,112,000	126,667,200	84,444,800	
10	MORAMO		4,046,002,000	2,427,601,200	1,618,400,800	
1	AMOHOLA	74.05. 102. 010	206,247,000	123,748,200	82,498,800	
2	TAMBOSUPA	74.05. 102. 011	212,829,000	127,697,400	85,131,600	
3	MARGA CITTA	74.05. 102. 012	228,462,000	137,077,200	91,384,800	
4	MORAMO	74.05. 102. 013	217,727,000	130,636,200	87,090,800	
5	BAKUTARU	74.05. 102. 014	212,580,000	127,548,000	85,032,000	
6	LAKOMEA	74.05. 102. 015	207,988,000	124,792,800	83,195,200	
7	LANDIPO	74.05. 102. 016	209,345,000	125,607,000	83,738,000	
8	LAMBOD	74.05. 102. 017	212,446,000	127,467,600	84,978,400	
9	PUDARIA JAYA	74.05. 102. 018	215,558,000	129,334,800	86,223,200	
10	SUMBER SARI	74.05. 102. 019	209,083,000	125,449,800	83,633,200	
11	ULUSENA JAYA	74.05. 102. 020	208,467,000	125,080,200	83,386,800	
12	PENAMBEA BARATA	74.05. 102. 021	213,325,000	127,995,000	85,330,000	
13	WOWOSUNGGU	74.05. 102. 022	210,608,000	126,364,800	84,243,200	
14	WAWONDENGI	74.05. 102. 023	225,098,000	135,058,800	90,039,200	
15	WATU PORAMBAA	74.05. 102. 025	212,825,000	127,695,000	85,130,000	
16	WONUA JAYA	74.05. 102. 026	213,140,000	127,884,000	85,256,000	
17	BISIKORI	74.05. 102. 027	209,018,000	125,410,800	83,607,200	
18	RANOOPA LESTARI	74.05. 102. 028	211,484,000	126,890,400	84,593,600	
19	SELABANGGA	74.05. 102. 029	209,772,000	125,863,200	83,908,800	
11	LAONTI		4,094,017,000	2,456,410,200	1,637,606,800	
1	LABAUN BEROPA	74.05. 112. 001	234,828,000	140,896,800	93,931,200	
2	TAMBOLOSU	74.05. 112. 002	211,663,000	126,997,800	84,665,200	
3	WORU-WORU	74.05. 112. 003	212,209,000	127,325,400	84,883,600	
4	TAMBEANGA	74.05. 112. 004	221,186,000	132,711,600	88,474,400	
5	LABOTAONE	74.05. 112. 005	213,242,000	127,945,200	85,296,800	
6	BATU JAYA	74.05. 112. 006	212,635,000	127,581,000	85,054,000	
7	NAMU	74.05. 112. 007	214,385,000	128,631,000	85,754,000	
8	MALARINGGI	74.05. 112. 008	221,050,000	132,630,000	88,420,000	
9	TUE-TUE	74.05. 112. 009	217,219,000	130,331,400	86,887,600	
10	SANGI-SANGI	74.05. 112. 010	215,756,000	129,453,600	86,302,400	
11	ULU SAWA	74.05. 112. 011	222,979,000	133,787,400	89,191,600	
12	LAWISATA	74.05. 112. 012	208,300,000	124,980,000	83,320,000	
13	KONONO	74.05. 112. 013	211,138,000	126,682,800	84,455,200	
14	PEO INDAH	74.05. 112. 014	208,192,000	124,915,200	83,276,800	
15	PUUNDIRANGGA	74.05. 112. 015	209,063,000	125,437,800	83,625,200	
16	CEMPEDAK	74.05. 112. 016	222,906,000	133,743,600	89,162,400	
17	LAONTI	74.05. 112. 017	208,624,000	125,174,400	83,449,600	
18	RUMBI-RUMBIA	74.05. 112. 018	211,934,000	127,160,400	84,773,600	
19	WANDAEHA	74.05. 112. 020	216,708,000	130,024,800	86,683,200	
12	LALEMBUU		3,662,586,000	2,197,551,600	1,465,034,400	
1	LAMBODI JAYA	74.05. 122. 001	224,010,000	134,406,000	89,604,000	
2	ATARI JAYA	74.05. 122. 002	225,142,000	135,085,200	90,056,800	
3	MOKUPA JAYA	74.05. 122. 003	210,516,000	126,309,600	84,206,400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	
4	LAMBANDIA	74.05. 122. 004	213,326,000	127,995,600	85,330,400	
5	KAPUWILA	74.05. 122. 006	220,242,000	132,145,200	88,096,800	
6	PUUNANGGA	74.05. 122. 007	211,340,000	126,804,000	84,536,000	
7	TETEINEA JAYA	74.05. 122. 008	210,655,000	126,393,000	84,262,000	
8	PUUREMA SUBUR	74.05. 122. 009	209,882,000	125,929,200	83,952,800	
9	LELEMBU JAYA	74.05. 122. 010	206,263,000	123,757,800	82,505,200	
10	SUKAMUKTI	74.05. 122. 011	230,010,000	138,006,000	92,004,000	
11	POTUHO JAYA	74.05. 122. 012	222,601,000	133,560,600	89,040,400	
12	MONDOKE	74.05. 122. 013	208,147,000	124,888,200	83,258,800	
13	SUMBER JAYA	74.05. 122. 014	230,584,000	138,350,400	92,233,600	
14	MERONGGA RAYA	74.05. 122. 015	209,395,000	125,637,000	83,758,000	
15	TOMBELEU	74.05. 122. 016	206,218,000	123,730,800	82,487,200	
16	PADALEU	74.05. 122. 017	213,216,000	127,929,600	85,286,400	
17	LALOUESAMBA	74.05. 122. 018	211,039,000	126,623,400	84,415,600	
13	BENUA		2,600,696,000	1,560,417,600	1,040,278,400	
1	LAMARA	74.05. 132. 001	226,859,000	136,115,400	90,743,600	
2	PUOSU	74.05. 132. 002	217,047,000	130,228,200	86,818,800	
3	BENUA UTAMA	74.05. 132. 003	226,441,000	135,864,600	90,576,400	
4	HORODOPI	74.05. 132. 004	214,156,000	128,493,600	85,662,400	
5	BENUA	74.05. 132. 005	215,181,000	129,108,600	86,072,400	
6	PALOWEWU	74.05. 132. 006	222,268,000	133,360,800	88,907,200	
7	PUNGGAWUKAWU	74.05. 132. 007	222,933,000	133,759,800	89,173,200	
8	UELAWA	74.05. 132. 008	211,846,000	127,107,600	84,738,400	
9	TETEHAKA	74.05. 132. 009	208,200,000	124,920,000	83,280,000	
10	AWALO	74.05. 132. 010	213,749,000	128,249,400	85,499,600	
11	KOSAMBI	74.05. 132. 011	210,304,000	126,182,400	84,121,600	
12	PUUWEHUKO	74.05. 132. 012	211,712,000	127,027,200	84,684,800	
14	PALANGGA SELATAN		1,950,891,000	1,170,534,600	780,356,400	
1	LAKARA	74.05. 142. 002	217,330,000	130,398,000	86,932,000	
2	PARASI	74.05. 142. 003	218,518,000	131,110,800	87,407,200	
3	ULU LAKARA	74.05. 142. 004	228,415,000	137,049,000	91,366,000	
4	WATUMBOHOTI	74.05. 142. 005	213,628,000	128,176,800	85,451,200	
5	WAWOWONUA	74.05. 142. 006	225,618,000	135,370,800	90,247,200	
6	WATURAPA	74.05. 142. 007	209,751,000	125,850,600	83,900,400	
7	KOEONO	74.05. 142. 008	212,998,000	127,798,800	85,199,200	
8	LALOWUA	74.05. 142. 009	211,514,000	126,908,400	84,605,600	
9	MONDOE	74.05. 142. 010	213,119,000	127,871,400	85,247,600	
15	MOWILA		4,268,313,000	2,560,987,800	1,707,325,200	
1	KONDOANO	74.05. 152. 001	213,203,000	127,921,800	85,281,200	
2	PUNGGULAH	74.05. 152. 002	207,605,000	124,563,000	83,042,000	
3	LAMOLORI	74.05. 152. 003	210,337,000	126,202,200	84,134,800	
4	TOLUWONUA	74.05. 152. 004	210,357,000	126,214,200	84,142,800	
5	MULYASARI	74.05. 152. 005	207,529,000	124,517,400	83,011,600	
6	RAKAWUTA	74.05. 152. 006	209,953,000	125,971,800	83,981,200	
7	RANOAOFA	74.05. 152. 007	207,935,000	124,761,000	83,174,000	
8	MOWILA	74.05. 152. 008	217,368,000	130,420,800	86,947,200	
9	LALOSINGI	74.05. 152. 009	213,985,000	128,391,000	85,594,000	
10	WUURA	74.05. 152. 010	210,218,000	126,130,800	84,087,200	
11	PUDAHOA	74.05. 152. 011	226,779,000	136,067,400	90,711,600	
12	MONAPA	74.05. 152. 012	209,863,000	125,917,800	83,945,200	
13	PUUWEHUKO	74.05. 152. 013	220,166,000	132,099,600	88,066,400	
14	RANOMBAYASA	74.05. 152. 014	208,665,000	125,199,000	83,466,000	
15	WANUAKONGGA	74.05. 152. 015	216,100,000	129,660,000	86,440,000	
16	MATAIWOI	74.05. 152. 016	227,677,000	136,606,200	91,070,800	
17	LAMEBARA	74.05. 152. 017	208,817,000	125,290,200	83,526,800	
18	TETESINGI	74.05. 152. 018	218,263,000	130,957,800	87,305,200	
19	WONUA SARI	74.05. 152. 019	207,157,000	124,294,200	82,862,800	
20	WONUA MONAPA	74.05. 152. 020	216,336,000	129,801,600	86,534,400	
16	MORAMO UTARA		1,937,086,000	1,162,251,600	774,834,400	
1	PUASANA	74.05. 162. 001	207,813,000	124,687,800	83,125,200	
2	TANJUNG TIRAM	74.05. 162. 003	216,840,000	130,104,000	86,736,000	
3	WAWATU	74.05. 162. 004	228,742,000	137,245,200	91,496,800	
4	SANGGULA	74.05. 162. 005	214,951,000	128,970,600	85,980,400	
5	LOMBUEA	74.05. 162. 006	222,958,000	133,774,800	89,183,200	
6	MEKAR JAYA	74.05. 162. 007	214,242,000	128,545,200	85,696,800	
7	LAMOKULA	74.05. 162. 008	210,541,000	126,324,600	84,216,400	
8	MATA WAWATU	74.05. 162. 009	209,376,000	125,625,600	83,750,400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	
9	MATA LAMOKULA	74.05. 162. 010	211,623,000	126,973,800	84,649,200	
17	BUKE		5,538,400,000	2,123,040,000	1,415,360,000	
1	ANDOOLO UTAMA	74.05. 172. 001	227,310,000	136,386,000	90,924,000	
2	ANGGOKOTI	74.05. 172. 002	215,227,000	129,136,200	86,090,800	
3	ASEMBU MULYA	74.05. 172. 003	215,363,000	129,217,800	86,145,200	
4	AWALO	74.05. 172. 004	223,636,000	134,181,600	89,454,400	
5	ADAKA JAYA	74.05. 172. 005	214,140,000	128,484,000	85,656,000	
6	BUKE	74.05. 172. 006	239,051,000	143,430,600	95,620,400	
7	PELANDIA	74.05. 172. 007	223,572,000	134,143,200	89,428,800	
8	PUUDARIA JAYA	74.05. 172. 008	223,669,000	134,201,400	89,467,600	
9	RAHAMENDA JAYA	74.05. 172. 009	226,780,000	136,068,000	90,712,000	
10	SILEA JAYA	74.05. 172. 010	218,375,000	131,023,800	87,349,200	
11	TIRTAMARTANI	74.05. 172. 011	211,853,000	127,111,800	84,741,200	
12	TETENGGOLASA	74.05. 172. 012	218,247,000	130,948,200	87,298,800	
13	ADAYU INDAH	74.05. 172. 013	236,142,000	141,685,200	94,456,800	
14	WANUA MAROA	74.05. 172. 014	211,831,000	127,098,600	84,732,400	
15	WULELE JAYA	74.05. 172. 015	214,576,000	128,745,600	85,830,400	
16	RANOHA LESTARI	74.05. 172. 016	218,630,000	131,178,000	87,452,000	
18	WOLASI		1,485,942,000	891,565,200	594,376,800	
1	WOLASI	74.05. 182. 001	213,822,000	128,293,200	85,528,800	
2	AOMA	74.05. 182. 002	213,860,000	128,316,000	85,544,000	
3	AMOITO JAYA	74.05. 182. 003	207,904,000	124,742,400	83,161,600	
4	LELEKA	74.05. 182. 004	217,359,000	130,415,400	86,943,600	
5	MATA WOLASI	74.05. 182. 005	213,630,000	128,178,000	85,452,000	
6	RANOWILA	74.05. 182. 006	209,351,000	125,610,600	83,740,400	
7	AUNUPE	74.05. 182. 007	210,016,000	126,009,600	84,006,400	
19	LAEYA		3,377,009,000	2,026,205,400	1,350,803,600	
1	AEPODU	74.05. 192. 003	216,817,000	130,090,200	86,726,800	
2	RAMBU-RAMBU	74.05. 192. 004	232,125,000	139,275,000	92,850,000	
3	OMBU-OMBU JAYA	74.05. 192. 005	216,390,000	129,834,000	86,556,000	
4	LAMONG JAYA	74.05. 192. 006	218,974,000	131,384,400	87,589,600	
5	LEREPAKO	74.05. 192. 007	225,166,000	135,099,600	90,066,400	
6	AMBESEA	74.05. 192. 008	238,265,000	142,959,000	95,306,000	
7	LAEYA	74.05. 192. 009	249,862,000	149,917,200	99,944,800	
8	LABOKEO	74.05. 192. 010	222,578,000	133,546,800	89,031,200	
9	TOROBULU	74.05. 192. 011	254,837,000	152,902,200	101,934,800	
10	ANDUNA	74.05. 192. 012	222,031,000	133,218,600	88,812,400	
11	AMBAKUMINA	74.05. 192. 013	211,701,000	127,020,600	84,680,400	
12	LAMBAKARA	74.05. 192. 014	220,475,000	132,285,000	88,190,000	
13	ANGGOROBOTI	74.05. 192. 015	210,042,000	126,025,200	84,016,800	
14	WONUVA KONGGA	74.05. 192. 016	220,908,000	132,544,800	88,363,200	
15	PUUWULO	74.05. 192. 017	216,838,000	130,102,800	86,735,200	
20	BAITO		1,797,597,000	1,078,558,200	719,038,800	
1	AMASARA	74.05. 202. 001	226,887,000	136,132,200	90,754,800	
2	BAITO	74.05. 202. 002	222,463,000	133,477,800	88,985,200	
3	MATABUBU	74.05. 202. 003	224,797,000	134,878,200	89,918,800	
4	MEKAR JAYA	74.05. 202. 004	216,597,000	129,958,200	86,638,800	
5	SAMBAHULE	74.05. 202. 005	225,262,000	135,157,200	90,104,800	
6	TOLIHE	74.05. 202. 006	214,743,000	128,845,800	85,897,200	
7	WONUVA RAYA	74.05. 202. 007	239,740,000	143,844,000	95,896,000	
8	AHUANGGULURI	74.05. 202. 008	227,108,000	136,264,800	90,843,200	
21	BASALA		1,925,758,000	1,155,454,800	770,303,200	
1	IWOIMENDORO	74.05. 212. 001	218,174,000	130,904,400	87,269,600	
2	EPEESI	74.05. 212. 002	214,942,000	128,965,200	85,976,800	
3	LERE	74.05. 212. 003	211,124,000	126,674,400	84,449,600	
4	LIPUMASAGENA	74.05. 212. 004	221,303,000	132,781,800	88,521,200	
5	LAMBANDIA	74.05. 212. 005	209,031,000	125,418,600	83,612,400	
6	POLO-POLOLI	74.05. 212. 006	209,674,000	125,804,400	83,869,600	
7	BASALA	74.05. 212. 007	216,741,000	130,044,600	86,696,400	
8	TOMBEKUKU	74.05. 212. 008	215,498,000	129,298,800	86,199,200	
9	TEPOROMBUA	74.05. 212. 009	209,271,000	125,562,600	83,708,400	
22	RANOMEETO BARAT		1,935,421,000	1,161,252,600	774,168,400	
1	AMOKUNI	74.05. 222. 001	214,942,000	128,965,200	85,976,800	
2	SINDANG KASIH	74.05. 222. 002	220,267,000	132,160,200	88,106,800	
3	JATI BALI	74.05. 222. 003	215,273,000	129,163,800	86,109,200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	
4	LAIKANDONGA	74.05. 222. 004	224,277,000	134,566,200	89,710,800	
5	BORO-BORO LAMEURU	74.05. 222. 005	210,964,000	126,578,400	84,385,600	
6	OPAASI	74.05. 222. 006	208,502,000	125,101,200	83,400,800	
7	LAMERURU	74.05. 222. 007	213,325,000	127,995,000	85,330,000	
8	ABEKO	74.05. 222. 008	208,586,000	125,151,600	83,434,400	
9	TUNDUNO	74.05. 222. 009	219,285,000	131,571,000	87,714,000	
23	ANDOOLO BARAT		2,202,962,000	1,321,777,200	881,184,800	
1	ANESE	74.05. 032. 006	221,569,000	132,941,400	88,627,600	
2	BEKENGASU	74.05. 032. 011	232,128,000	139,276,800	92,851,200	
3	BIMA MAROA	74.05. 032. 013	219,844,000	131,906,400	87,937,600	
4	LAPOA INDAH	74.05. 032. 016	218,366,000	131,019,600	87,346,400	
5	MATAIWOI	74.05. 032. 017	221,636,000	132,981,600	88,654,400	
6	PAPAWU	74.05. 032. 021	211,996,000	127,197,600	84,798,400	
7	WATUMOKALA	74.05. 032. 025	234,859,000	140,915,400	93,943,600	
8	WAWOBENDE	74.05. 032. 027	210,791,000	126,474,600	84,316,400	
9	MATEUPE	74.05. 032. 028	216,692,000	130,015,200	86,676,800	
10	PUUNDOHO	74.05. 032. 032	215,081,000	129,048,600	86,032,400	
24	SABULAKOA		1,918,893,000	1,151,335,800	767,557,200	
1	WAWOBENDE	74.05. 052. 003	219,671,000	131,802,600	87,868,400	
2	ASARIA	74.05. 052. 006	220,628,000	132,376,800	88,251,200	
3	WATU-WATU	74.05. 052. 013	206,478,000	123,886,800	82,591,200	
4	SABULAKOA	74.05. 052. 020	215,047,000	129,028,200	86,018,800	
5	KORONUA	74.05. 052. 021	215,212,000	129,127,200	86,084,800	
6	WONUAKOA	74.05. 052. 028	212,352,000	127,411,200	84,940,800	
7	TETENGGABO	74.05. 052. 029	211,946,000	127,167,600	84,778,400	
8	TALUMBINGA	74.05. 052. 030	208,749,000	125,249,400	83,499,600	
9	ULU SABULAKOA	74.05. 052. 043	208,810,000	125,286,000	83,524,000	
25	KOLONO TIMUR		2,171,430,000	1,302,858,000	868,572,000	
1	LAMBANGI	74.05. 092. 015	227,485,000	136,491,000	90,994,000	
2	RUMBA-RUMBA	74.05. 092. 017	226,744,000	136,046,400	90,697,600	
3	TUMBU-TUMBU JAYA	74.05. 092. 018	213,764,000	128,258,400	85,505,600	
4	NGAPAWALI	74.05. 092. 019	213,718,000	128,230,800	85,487,200	
5	BATU PUTIH	74.05. 092. 020	212,771,000	127,662,600	85,108,400	
6	RAMBU-RAMBU	74.05. 092. 021	215,433,000	129,259,800	86,173,200	
7	AMPERA	74.05. 092. 022	218,422,000	131,053,200	87,368,800	
8	AMOLENGU	74.05. 092. 023	216,219,000	129,731,400	86,487,600	
9	LANGGAPULU	74.05. 092. 024	215,666,000	129,399,600	86,266,400	
10	ULLUNESE	74.05. 092. 032	211,208,000	126,724,800	84,483,200	
JUMLAH			73,000,000,000	43,800,000,000	29,200,000,000	



BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Handwritten:
 Kepala
 Bagian I
 Ker. BPMD

Handwritten:
 Kabid Pamban
 Kemand. Konawe Sel.

Lampiran II : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 02 Mei 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

**PERUBAHAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN BENDAHARA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016.**

No.	Uraian/Jabatan	Siltap/ Bulan (Rp.)	Tunjangan/ Bulan. (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Desa PNS	-	500.000,-	
2.	Kepala Desa Non PNS	3.000.000,-	500.000,-	
3.	Sekdes PNS	-	300.000,-	
4.	Sekdes Non PNS	550.000,-	300.000,-	
5.	Kaur. Administrasi	450.000,-	-	
6.	Kaur. Keuangan	450.000,-	200.000,-	
7.	Kaur. Umum	450.000,-	-	
8.	Kasi. Pemerintahan	450.000,-	-	
9.	Kasi. Pembangunan	450.000,-	-	
10.	Kasi. Kesejahteraan	450.000,-	-	
11.	Kadus. I	400.000,-	-	
12.	Kadus. II	400.000,-	-	
13.	Kadus. III	400.000,-	-	
14.	Kadus. IV	400.000,-	-	

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Sekda

Asisten I

Ka. BPMD

Kabid. Pandes

Kombid. Otomasi

Lampiran III : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 02 Mei 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

**PERUBAHAN BESARAN BIAYA
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BPD, TP-PKK, LPM DAN KARANG
TARUNA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT), IMAM DESA,
PEMANGKU ADAT, KADER POSYANDU, PERTAHANAN SIPIL (HANSIP),
DAN GURU AGAMA TAHUN ANGGARAN 2016.**

No.	Uraian/Jabatan	BOP/ Tahun (Rp.)	Insentif/ Bulan/Org. (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	BOP. Pemdes	11.000.000,-	-	
2.	BOP. BPD	7.500.000,-	-	
4.	BOP. TP-PKK	12.000.000,-	-	
5.	BOP. LPM	6.000.000,-	-	
6.	BOP. Karang Taruna	4.000.000,-	-	
7.	Rukun Tetangga (RT)	-	225.000,-	
8.	Imam Desa	-	250.000,-	
9.	Pemangku Adat	-	250.000,-	
10.	Kader Posyandu	-	100.000,-	
11.	Pertahanan Sipil (Hansip)	-	100.000,-	
12.	Guru Agama (Islam, Kristen, Hindu, dan Budha)	-	250.000,-	

Sekda
Asisten I
Ka. BPTD
Kabid. Pemdes
Kombid. Lotanin An

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA